

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dapat diartikan secara luas, dan merupakan suatu proses pembelajaran yang dapat dilakukan dimana saja. Pendidikan terdiri dari pendidikan formal dan non formal. Pendidikan non formal sudah dilakukan sejak manusia lahir, sedangkan pendidikan formal diselenggarakan di sekolah yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi.

Indrajit dan Djokopranoto (2006:3) mengemukakan bahwa Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Sebaliknya perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Ditjen Dikti mengeluarkan surat edaran no. 97/E/KU/2013. Dalam surat tersebut Ditjen Dikti meminta

kepada pimpinan PTN untuk menghapus uang pangkal dan melaksanakan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2013/2014 dan seterusnya.

Uang kuliah tunggal (UKT) merupakan tarif uang kuliah yang mengintegrasikan tiga komponen pembayaran yaitu SPMA, SPP, dan BOP. UKT merupakan besaran biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap semester. Dalam Permendikbud No. 73 tahun 2014 UKT ditentukan berdasarkan kelompok ekonomi masyarakat yang dibagi dalam 8 (delapan) kelompok dari yang terendah hingga yang tertinggi yaitu kelompok I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII. Tujuan diberlakukannya UKT adalah untuk mempermudah proses pembayaran biaya kuliah dan menghilangkan tambahan-tambahan biaya lain (uang pangkal, gedung, administrasi, dll) yang sulit diawasi oleh Negara. Dengan begitu diharapkan seluruh rakyat Indonesia akan lebih mudah dalam mengakses pendidikan tinggi. Sehingga dengan sistem UKT ini komponen yang akan dibayarkan oleh mahasiswa hanya satu saja. Dengan prinsip subsidi silang diharapkan UKT dapat meringankan beban mahasiswa.

Kebijakan UKT yang ditetapkan oleh Ditjen Dikti wajib dilaksanakan oleh seluruh PTN termasuk Universitas Negeri Gorontalo (UNG). UNG mulai memberlakukan sistem UKT sejak tahun 2013.

Universitas Negeri Gorontalo (UNG) adalah bagian dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Dalam pengelolaan keuangan Universitas Negeri Gorontalo memiliki

dua sumber pendanaan yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Badan Layanan Umum (BLU).

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) merupakan konsep baru dalam pengelolaan keuangan negara. Konsep ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Fleksibilitas yang diberikan antara lain adalah kewenangan untuk mengelola langsung pendapatan yang diperoleh dari masyarakat maupun dari hasil kerja sama atau hibah. Namun pada BLU juga diterapkan sistem pengendalian yang khusus pada tahap perencanaan dan penganggaran serta pada tahap pertanggungjawaban. Menurut Soekartawi, 2000 (dalam Ependi,2013) Perencanaan adalah pemilihan alternatif atau pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia. Sedangkan penganggaran menurut Supriyono (1990:15) merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian (pengawasan) keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang.

Dalam proses perencanaan dan penganggaran tersebut, satker BLU menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dengan mengacu kepada Rencana Strategi Bisnis dan disusun berdasarkan kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta kebutuhan dan

kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain dan APBN.

Badan Layanan Umum (BLU) adalah Instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam proses perencanaan dan penganggaran dana operasional BLU, sesuai dengan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005, terdiri atas :

- a. Penerimaan anggaran yang berasal dari APBN/APBD
- b. Pendapatan yang berasal dari jasa layanan kepada masyarakat
- c. Hibah tidak terikat
- d. Hibah terikat
- e. Hasil kerjasama satker BLU dengan pihak lain dan hasil usaha lainnya

Pendapatan yang berasal dari jasa layanan kepada masyarakat adalah pendapatan yang diterima atas jasa yang diberikan kepada masyarakat yang dikelola oleh BLU untuk membiayai belanja BLU sesuai rencana bisnis dan anggaran (RBA). Pendapatan ini harus dilaporkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kementerian Negara / lembaga induk dari BLU tersebut (Mediya Lukman, 2013:147).

Fenomena di lapangan saat ini dengan berubahnya sistem penerimaan jasa layanan kepada masyarakat dari sistem lama menjadi sistem UKT,

mahasiswa hanya perlu membayar satu biaya saja yang besarnya tetap sesuai dengan kategori yang dimiliki yang telah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua atau penanggung biaya kuliah mahasiswa tersebut. Hal ini kemudian berdampak pada penurunan pagu PNBPN yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan operasional universitas. Di satu sisi universitas dituntut untuk menghasilkan output yang baik dan bermutu tinggi tentunya memerlukan biaya yang cukup besar, namun disisi lain universitas harus melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan biaya yang terbatas.

Berikut adalah tabel 1.1 PAGU PNBPN dari tahun 2010 s.d tahun 2013 yang dalam tahun 2010 s.d 2012 terus mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 14,72% dari tahun 2012.

**Tabel 1.1 PAGU PNBPN**

Tahun	PAGU AWAL PNBPN	KATEGORI	% Perubahan	ALASAN PERUBAHAN
2010	29.559.310.000			
2011	42.273.051.000	MENINGKAT	43.01%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa dari tahun sebelumnya</li> <li>• Adanya kerjasama dan penambahan program kegiatan PNBPN UNG dalam menunjang Tridarma Perguruan Tinggi</li> </ul>
2012	59.250.463.000	MENINGKAT	40,16%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa dari tahun sebelumnya</li> <li>• Adanya Perubahan Sistem Penerimaan SPP dari tahun sebelumnya</li> <li>• Adanya kerjasama dan penambahan program kegiatan PNBPN UNG dalam menunjang Tridarma Perguruan Tinggi Negeri</li> </ul>

2013	50.531.075.000	MENURUN	(14,72%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya perubahan Sistem Penerimaan SPP mahasiswa baru yakni Sistem Uang Kuliah Tunggal</li> </ul>
------	----------------	---------	----------	--

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran UNG

Berdasarkan tabel PAGU PNBPN, telah dijelaskan penyebab terjadinya penurunan PAGU PNBPN untuk tahun anggaran 2013 disebabkan oleh adanya perubahan dalam sistem penerimaan SPP Mahasiswa baru yakni Sistem Uang Kuliah Tunggal. Hal ini yang kemudian menyebabkan tiap unit kerja berusaha untuk mengoptimalkan anggaran yang ada dalam menunjang kegiatan operasional BLU pada Universitas Negeri Gorontalo. Hal ini kemudian dijelaskan dalam bentuk tabel 1.2 Perubahan Anggaran Belanja Unit Kerja Tahun 2013.

**Tabel 1.2 Perubahan Anggaran Belanja Unit Kerja Tahun 2013**

No.	Unit Kerja	Anggaran Semula	Perubahan Anggaran	% Perubahan
1	FIP	2,620,942,500	2,050,821,000	(21.75)
2	FIS	1,362,603,750	1,532,903,000	12.50
3	FMIPA	2,097,753,000	1,977,985,000	(5.71)
4	FSB	2,646,758,750	1,863,070,000	(29.61)
5	FATEK	2,162,900,000	1,679,839,000	(22.33)
6	FAPERTA	1,916,767,500	1,761,232,000	(8.11)
7	FIKK	3,282,842,250	2,839,564,000	(13.50)
8	FEB	3,046,599,825	2,466,601,000	(19.04)
9	PPs	2,052,206,250	3,712,206,000	80.89
10	LPM	1,484,248,000	2,045,017,000	37.78
11	LEMLIT	1,077,417,750	1,016,365,000	(5.67)
12	LP3	1,275,000,000	1,966,431,000	54.23
13	PERPUSTAKAAN	566,220,000	497,567,000	(12.12)
14	PUSTIKOM	953,477,700	948,191,000	(0.55)
15	PPMA	466,128,750	316,579,000	(32.08)
16	BIRO AUK	19,662,992,725	20,749,377,000	5.53
17	PPI	193,970,000	180,370,000	(7.01)
18	BKPI/ PKPK	632,876,250	302,610,000	(52.18)
19	BIRO AAKPSI	1,927,120,000	1,819,130,000	(5.60)
20	PPB	458,250,000	337,142,000	(26.43)

21	PPIK	644,000,000	468,075,000	(27.32)
Total PAGU		50,531,075,000	50,531,075,000	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran UNG

Dalam Tabel Perubahan Anggaran Belanja Unit Kerja Tahun 2013 dijelaskan bahwa beberapa unit harus melakukan efisiensi penggunaan dana dalam kegiatan operasional BLU sebagai akibat dari menurunnya jumlah PAGU PNBPN 2013 sebanyak 14,72% dari tahun sebelumnya. Anggaran yang diefisiensikan oleh sebagian besar unit kerja dalam mata anggaran kegiatan (mak) perjalanan dinas, ATM/ATK dan pemeliharaan, kemudian direvisi geser kelima unit yang membutuhkan dana lebih banyak untuk memenuhi kegiatan operasionalnya. Pada unit kerja Fakultas Ilmu Sosial (FIS) mengalami perubahan anggaran sebesar 12,50% karena pada fakultas ini terdapat peningkatan jumlah mahasiswa baru dari yang telah diperkirakan sebelumnya, sehingga jumlah pagu yang diperkirakan di awal perlu di tingkatkan juga untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Pada Program Pascasarjana (PPs) mengalami perubahan anggaran sebesar 80,89% dari anggaran semula disebabkan oleh peningkatan jumlah mahasiswa Program pascasarjana. Selanjutnya LPM mengalami peningkatan anggaran sebesar 37,78% disebabkan oleh peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikut Kuliah Kerja Sibermas (KKS) dari yang diperkirakan sebelumnya. Begitu juga dengan LP3 yang mengalami perubahan anggaran sebesar 54,23% dari anggaran sebelumnya disebabkan oleh peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PPL. Selanjutnya BAUK mengalami perubahan anggaran sebesar 5,53%

disebabkan oleh banyaknya kegiatan yang bersifat insidental yang harus dibiayai, seperti seminar klapa, perjalanan dinas pembantu dekan fakultas, dan belanja lainnya yang tidak bisa dibiayai oleh unit kerja lain.

Sebagai tambahan data pendukung, peneliti juga menyajikan tabel 1.3 Data Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2013 dan 2014, tabel 1.4 Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan Dan tabel 1.5 Laporan Realisasi Anggaran Belanja BLU sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

**Tabel 1.3 Data Penerimaan Mahasiswa Baru UNG**

Fakultas	Mahasiswa Baru					
	2013			2014		
	UKT	Non UKT	Jumlah	UKT	Non UKT	Jumlah
FIP	369	288	657	133	284	417
FMIPA	318	197	515	198	317	515
FIS	403	196	599	224	321	545
FSB	279	100	379	114	170	284
FATEK	300	135	435	205	191	396
FAPERTA	236	236	472	155	418	573
FIKK	636	301	937	259	469	728
FEB	464	247	711	244	371	615
PPS	0	149	149	0	247	247
TOTAL	3005	1849	4854	1532	2788	4320
Sumber : BAAKPSI 2014, diolah						

**Tabel 1.4 Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan**

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2010	48.737.347.000	44.815.939.162	91,95%
2011	58.491.117.000	51.049.375.008	87,28%
2012	65.634.653.000	58.111.484.375	88,54%
2013	50.531.075.000	46.979.658.992	92,97%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, diolah

**Tabel 1.5 Laporan Realisasi Anggaran Belanja**



Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2010	48.737.347.000	42.519.114.995	87,24%
2011	58.491.117.000	50.812.978.454	86,87%
2012	65.634.653.000	60.150.907.015	91,65%
2013	50.531.075.000	49.850.902.158	98,65%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, diolah

Berdasarkan tabel 1.4 Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan tabel 1.5 Laporan Realisasi Anggaran Belanja, untuk lebih memperjelas gambaran masalah peneliti menampilkan tabel 1.6 Realisasi Penerimaan Dan Belanja sejak tahun 2010 sampai dengan 2013.

**Tabel 1.6 Realisasi Penerimaan dan Belanja BLU UNG**

Tahun	Realisasi Penerimaan	Realisasi Belanja	Surplus/ (Defisit)
2010	44.815.939.162	42.519.114.995	2.296.824.167
2011	51.049.375.008	50.812.978.454	236.396.554
2012	58.111.484.375	60.150.907.015	(2.039.422.640)
2013	46.979.658.992	49.850.902.158	(2.871.243.166)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, diolah

Dalam Tabel 1.6 terlihat bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2013 jumlah penerimaan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah belanja pada tahun tersebut atau dengan kata lain mengalami defisit. Penerimaan dana operasional BLU yang mengalami penurunan sehingga mengakibatkan kegiatan operasional BLU mengalami beberapa hambatan terutama dalam

kegiatan operasionalnya karena keterbatasan dana operasional yang harus diupayakan dapat memenuhi pembiayaan program kegiatan yang telah direncanakan oleh BLU UNG pada tahun tersebut. Untuk dapat memperhitungkan tingkat penerimaan uang kuliah tunggal yang tepat dan dapat memenuhi kebutuhan operasional diperlukan analisis break Even point.

Bustami dan Nurlela (2006:208) mengemukakan bahwa: “analisis titik impas (*break even point*) adalah suatu cara atau teknik yang digunakan oleh seorang manajer perusahaan untuk mengetahui pada volume (jumlah) penjualan dan volume produksi berapakah suatu perusahaan yang bersangkutan tidak menderita kerugian dan tidak pula memperoleh laba”.

Horngren, *et al.*(2008:75) mengemukakan bahwa titik impas (*break even point*) adalah jumlah penjualan output yang akan menyamakan pendapatan total dengan biaya total yaitu, jumlah penjualan output yang akan menghasilkan laba operasi \$0 (nol). Manajer tertarik pada titik impas karena ingin menghindari rugi operasi (*operating loss*). Titik impas menjelaskan berapa banyak output harus terjual agar tidak menanggung rugi operasi.

Teori tersebut yang kemudian menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian tentang uang kuliah tunggal yang cenderung berdampak pada penurunan anggaran operasional PNBK. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan judul penelitian yakni “ Analisis Break Even Point

Dalam Perhitungan Uang Kuliah Tunggal Pada Universitas Negeri Gorontalo”.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dari penelitian ini adalah

1. Adanya kebijakan penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai pendapatan yang berasal dari jasa layanan kepada masyarakat yang berdampak pada penurunan PNBP.
2. UKT memberikan implikasi terhadap penurunan anggaran unit kerja

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemberlakuan UKT sudah mencukupi biaya operasional BLU pada UNG ?
2. Pada tingkat nilai berapa pendapatan UKT mampu menutupi biaya Operasional BLU pada UNG ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pemberlakuan UKT sudah mencukupi biaya operasional BLU pada UNG
2. Untuk mengetahui pada tingkat nilai berapa pendapatan UKT mampu menutupi biaya Operasional BLU pada UNG

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian adalah :

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

- 1 Bagi peneliti dan pembaca lainnya diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan ilmiah mengenai Analisis Break Even Point Dalam Perhitungan Uang Kuliah Tunggal Pada Universitas Negeri Gorontalo.
- 2 Sebagai bahan referensi tambahan bagi pihak-pihak ataupun generasi-generasi berikutnya yang akan meneliti kasus yang sama.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga ataupun instansi lainnya yang memberlakukan sistem UKT serta dapat memberikan sumbangan pikiran khususnya kepada Universitas Negeri Gorontalo dalam perhitungan UKT dengan menggunakan analisis *break even point* sehingga dapat tercipta penetapan UKT yang bijaksana yang dapat memenuhi kebutuhan operasional BLU UNG sekaligus dapat diterima oleh masyarakat dan orang tua mahasiswa selaku penanggung biaya kuliah dengan baik.